

**PERAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN
SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*

Oleh :

MUHAMMAD MYCHO BONEH
NIM. 2320122012



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

PERAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH:

**Muhammad Mycho Boneh, 2320122012, Program Studi Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2026**

ABSTRAK

Kasus pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (11) mengatakan mediasi adalah cara penyelesaian kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya dan/ mediator pertanahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Sarolangun?, (2) Bagaimanakah proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun dalam penyelesaian sengketa tanah?, (3) Bagaimanakah peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis jenis penelitian primer, lokasi penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah umumnya dipicu oleh lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah, serta praktik transaksi yang tidak sesuai prosedur, sehingga kasusnya terus meningkat pada tahun 2023-2024. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan berperan penting sebagai mediator non-litigasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, dengan memfasilitasi komunikasi, negosiasi, hingga pencatatan kesepakatan yang sah. Meskipun masih terkedala keterbatasan bukti, sumber daya, dan kehadiran para pihak, mekanisme mediasi terbukti lebih efektif dibanding litigasi karena mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak atas tanah, serta menjaga keharmonisan sosial masyarakat agraris.

Kata Kunci: Peran, Kantor Pertanahan, Mediasi, Sengketa Tanah.

**THE ROLE OF THE LAND OFFICE IN SAROLANGUN REGENCY AS A
MEDIATOR BETWEEN THE PARTIES IN RESOLUTION OF LAND
DISPUTES :**

**Muhammad Mycho Boneh, 2320122012, Notary Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, 2026**

ABSTRACT

Land cases are a process of interaction between two (or more) or groups each fighting for their interests over the same object, namely land and other objects related to land, water, plants, mines, and air above the land in question. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases Article 1 paragraph (11) states that mediation is a way to resolve cases through a negotiation process to obtain an agreement carried out by the parties facilitated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, the Land Office in accordance with its authority and/or land mediator. The formulation of the problem in this study is: (1) What are the factors that cause land disputes in Sarolangun Regency?, (2) How is the mediation process at the Sarolangun Regency Land Office in resolving land disputes?, (3) What is the role of the Sarolangun Regency Land Office as a mediator in resolving land disputes?. The research method used is empirical juridical, descriptive analytical, primary research type, research location at the Sarolangun Regency Land Office. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the role of the Sarolangun Regency Land Office as a mediator between the parties in resolving land disputes is generally triggered by weak land administration, low public awareness in land registration, and transaction practices that do not comply with procedures, so that cases continue to increase in 2023-2024. In this case, the Land Office plays an important role as a non-litigation mediator based on the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020, by facilitating communication, negotiation, and recording of legal agreements. Although still hampered by limited evidence, resources, and the presence of the parties, the mediation mechanism has proven to be more effective than litigation because it is able to provide legal certainty, protect land rights, and maintain social harmony in agrarian communities.

Keywords: Role, Land Office, Mediation, Land Disputes.